

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1932 NO.  
121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN  
REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1939 NO. 357

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat lambung timbul;
- Mengingat : "Uitwateringsverordening 1935" (Staatblad 1932 No. 121) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1939 No. 357;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STBL. 1932 NO. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1939 NO. 357

sebagai berikut :

Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat lambung timbul seperti yang disebut dalam lampiran II dari "Uitwateringsverordening 1935" (Staatsblad 1932 No. 121) yang telah diubah dan ditambah dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1939 No. 357, dinaikkan dengan 200%.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta;  
pada tanggal 16 Nopember 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SUKARNO)

MENTERI PELAYARAN

ttd.

(NAZIR)

Diundangkan  
pada tanggal 26 Nopember 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENGUBAHAN "UITWATERINGSVERORDENING 1935" (STBL. 1932  
No. 121) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR  
DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1939 No. 357.

Pembayaran untuk sertifikat lambung timbul masih diperhitungkan berdasarkan tarif yang berlaku sebelum perang.

Berdasarkan kenaikan umum dari tingkat harga-harga, maka pembayaran tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dinaikkan dengan 200%.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 156 NOMOR 1472 DAN TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA